



RENCANA KERJA

TAHUN

2023

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023. Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 merupakan tahapan kelima dari 6 (enam) tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dan berpedoman kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sedangkan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami sadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik berkenaan dengan substansi maupun penyajian dokumen ini. Saran dan masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadikan dokumen rancangan akhir Renja BKPSDMD lebih baik.

Pangkalpinang, Juni 2022

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dra. SUSANTI, M.AP.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650713 199203 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-8
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....	 II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD.....	II-14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD.....	II-20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-25
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDMD.....	 III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDMD.....	III-2
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-4
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	 IV-1
4.1 Rencana Kerja	IV-1
4.2 Pendanaan.....	IV-3
 BAB V PENUTUP.....	 V-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDMD dan Pencapaian Renstra BKPSDMD s.d. Tahun 2021 (Tahun Berjalan).....	II-2
Tabel 2.2	Jumlah ASN BKPSDMD Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin pertanggal 31 Desember 2021.....	II-16
Tabel 2.3	Jumlah ASN BKPSDMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan pertanggal 31 Desember 2021.....	II-16
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama BKPSDMD.....	II-17
Tabel 2.5	Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama BKPSDMD.....	II-17
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome).....	II-19
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Prov. Kep. Bangka Belitung.....	II-19
Tabel 3.1	Keterkaitan Tujuan Sasaran RPD dan Tujuan Sasaran BKPSDMD beserta Target pada Renja Tahun 2023.....	III-3
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-5

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA PD.....	I-3
Gambar 1.2	Bagan Alir Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	I-4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-15

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam tatanan pemerintahan tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Pemerintah daerah dalam undang-undang tersebut diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penjabaran RPJMD dituangkan dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang akan dijadikan pedoman Renja PD. Renja PD berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah selama satu tahun anggaran.

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Pasal 27 Ayat 1 menerangkan bahwa SKPD menyusun Renja-SKPD, selanjutnya diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BKPSDMD 2023-2026, mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan merupakan cakupan dari Rancangan Awal Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

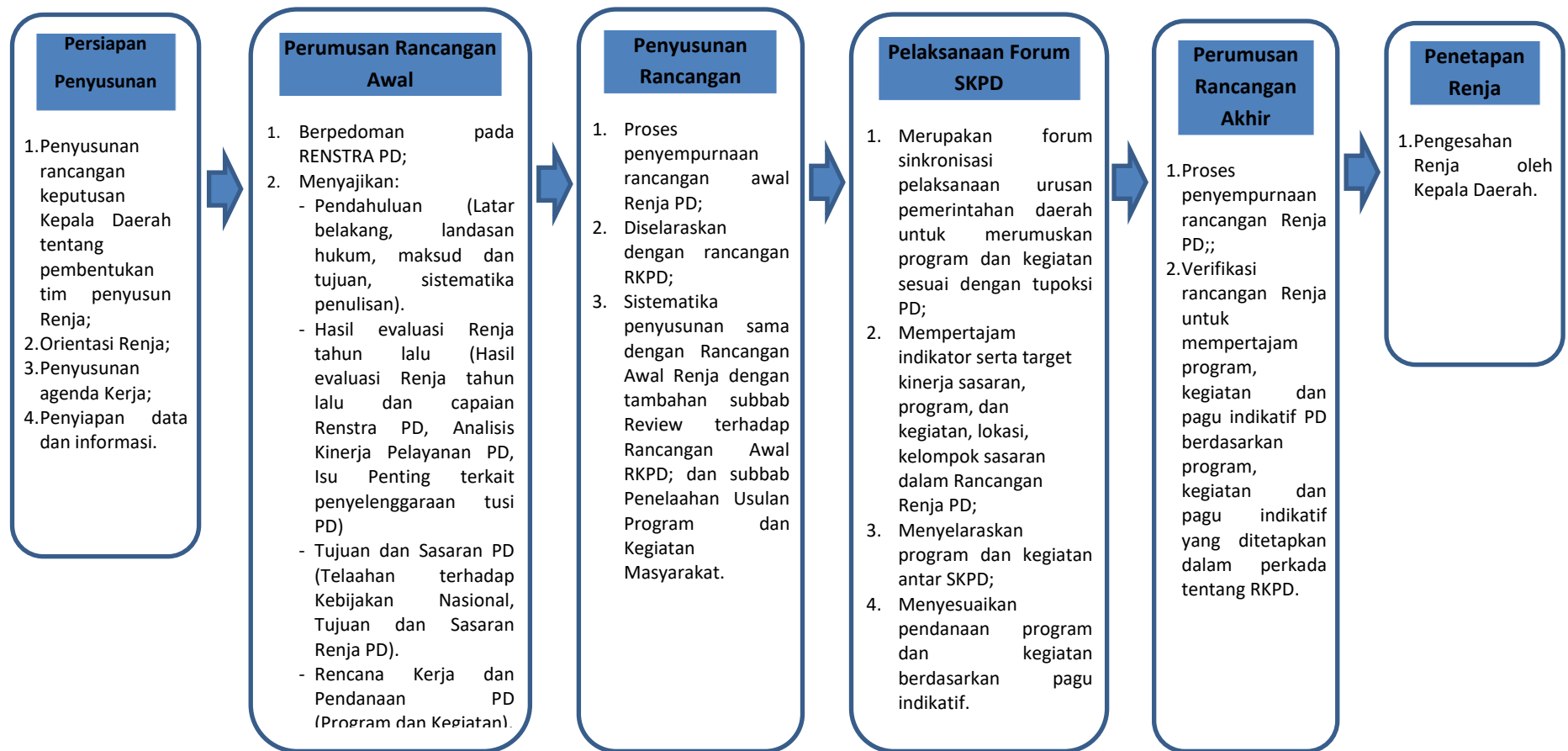
Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dengan persiapan penyusunan Renja BKPSDMD yang meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja BKPSDMD;
2. Orientasi mengenai Rencana Kerja BKPSMD;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja BKPSDMD; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Pemverifikasian oleh Bappeda dan penetapan oleh Peraturan Gubernur terhadap Rencana Kerja BKPSDMD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDMD pada Tahun Anggaran 2023. Berikut ini disajikan bagan tahapan penyusunan Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

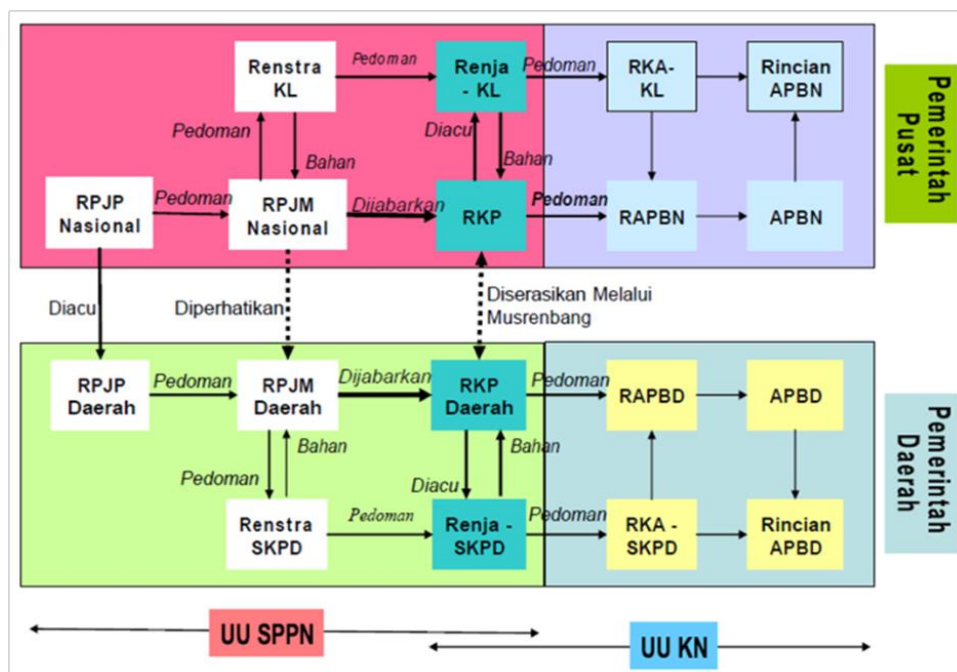


Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan dan sasaran kepala perangkat daerah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan perangkat daerah;
2. memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja Rencana Strategis perangkat daerah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah hingga tahun berkenaan.

Gambar 1.2.

Bagan Alir Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan

- Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 5 Seri D);
 17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor Seri F);
 18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor..... Seri....)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai upaya menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. untuk menjabarkan Renstra BKPSDMD Tahun 2023-2026 ke dalam dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
2. untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu sekaligus memperkirakan realisasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan.
3. mewujudkan Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 mengacu pada sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Didalamnya memuat subbab tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Bab ini berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan tahun 2023.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab ini berisikan rencana kerja dan pendanaan untuk tahun 2023.

BAB V Penutup.

Bab ini berisikan catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Tingkat capaian kinerja dari BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dapat diketahui tentunya dengan melakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021, berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan meskipun terjadi rasionalisasi anggaran sebagai upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia umumnya dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BKPSDMD melaksanakan 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan.

Total realisasi secara keseluruhan Belanja BKPSDMD tahun anggaran 2021 yakni 97,94% dengan realiasi fisik sebesar 100%. Adapun capaian realisasi kinerja (capaian *outcome* program dan *output* kegiatan) pada angka 97,94% berarti realisasi kinerja di antara interval $91 \leq 100\%$ yang merupakan kriteria penilaian kinerja "**SANGAT TINGGI**".

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2021 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDMD dan
Pencapaian Renstra BKPSDMD s.d. Tahun 2022 (tahun berjalan)*
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	86	80,88	85	81,75	96,18%	86	82	95,35%
		Survey kepuasan pelayanan internal	98	92,69%	95	69,42	73,07%	98	80	81,63%
	Kegiatan Admintrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan PD tepat waktu	3	3	3	3	100,00%	3	3	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	103	98	103	101	98,06%	103	101	98,06%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum PD	6	6	6	6	100,00%	6	6	100,00%
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	35	20	20	20	100,00%	35	35	100,00%
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6	6	6	6	100,00%	0	0	0,00%
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak	20	20	20	20	100,00%	20	20	100,00%
	Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia (2 jenis, bahan, dan alat)	2	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
		Jumlah jenis ATK yang dibeli	5	5	5	5	100,00%	5	5	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
		Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	100	145	145	145	100,00%	100	100,00%
		Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	200	200	200	200	100,00%	36	100,00%
			Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	24	24	24	24	100,00%	36	100,00%
			Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	1150	1150	1150	1150	100,00%	1150	100,00%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4	4	4	4	100,00%	3	100,00%
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/barang yang dikirim	2	2	2	2	100,00%	2	100,00%
			Jumlah materai	800	800	800	800	100,00%	3000	100,00%
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	12	12	12	100,00%	12	100,00%
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang dipekerjakan	81	81	81	81	100,00%	81	100,00%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD yang dipelihara	3	3	3	3	100,00%	3	100,00%
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7	7	7	7	100,00%	7	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3	3	3	3	100,00%	3	3	100,00%
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan/perengkapan gedung kantor yang dipelihara	2	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan formasi	73%	92	73	77	105,48%	73%	73%	100,00%
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pegawai yang terpenuhi sesuai formasi	176	0	146	593	406,16%	176	176	100,00%
	Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan formasi ASN	1	2	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN/IPDN yang lulus seleksi	176	127	146	593	406,16%	176	176	100,00%
		Jumlah tenaga kontrak yang dilakukan penataan	3650	0	3650	4463	122,27%	3650	4463	122,27%
	Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kelembagaan profesi ASN	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah pemberian bantuan hukum/LKBH KORPRI	100	0	5	0	0,00%	100	0	0,00%
		Jumlah peserta penyegaran rohani	600	0	600	0	0,00%	600	0	0,00%
	Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi yang dikelola	1	0	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	Subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dikelola datanya	5469	5385	5469	5386	98,48%	5469	5400	98,74%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah pegawai tugas belajar yang menerima beasiswa	11	30	11	11	100,00%	11	11	100,00%
	Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang menerima beasiswa	11	30	11	11	100,00%	11	11	100,00%
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dipromosi dan mutasi	325	478	200	1129	564,50%	325	325	100,00%
	Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi	325	478	200	1.129	564,50%	325	325	100,00%
	Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Kenaikan Pangkat	1175	1247	1151	1.191	103,48%	1175	1175	100,00%
	Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dipetakan sesuai kompetensi	350	478	200	361	180,50%	350	350	100,00%
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang terbina	5469	1866	5469	5386	98,48%	5469	5469	100,00%
	Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang diukur nilai indeks profesionalitasnya	5469	1866	5469	5386	98,48%	5469	5469	100,00%
	Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah penerbitan Satya Lencana	500	0	500	522	104,40%	500	500	100,00%
	Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dibina disiplinnya	3700	3000	2000	2.079	103,95%	3700	3700	100,00%
	Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani	8	0	8	9	112,50%	8	8	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	83%	100	83	69,9	84,22%	83%	83%	100,00%
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi teknis	76	97	17,18	14,57	84,84%	76%	76%	100,00%
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Konkuren, Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen petunjuk teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis	6	0	6	6	100,00%	6	6	100,00%
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis	16	0	16	0	0,00%	16	16	100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	1000	531	320	816	255,00%	1000	1000	100,00%
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan movev pengembangan kompetensi teknis	1	0	0	0	0,00%	10	10	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial dan fungsional	78	97	26,06	15,24	58,49%	78%	78%	100,00%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi	40	0	40	0	0,00%	0	0	0,00%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah dokumen mutu pengembangan kompetensi	8	3	8	8	100,00%	8	8	100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CASN yang mengikuti pengembangan kompetensi prajabatan	124	0	1.278	1.278	100,00%	124	124	100,00%
	Sub Kegiatan Pembinaan, Penguatiran, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan monev pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi	1	0	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Indikator suatu kegiatan dapat terdiri dari beberapa indikator kinerja, dimana target-target indikator kinerja dalam sebuah kegiatan realisasi capaiannya dapat terpenuhi, atau melebihi target, ataupun tidak tercapai. Berikut uraian hasil analisis evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. diatas.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2021, terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 85%, realisasi 81,75%
- Survey kepuasan pelayanan internal dengan target 95%, realisasi 69,42%.
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN dengan target 72%, realisasi 66,20%.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2021, sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran BKPSDMD, dimana realisasi kinerja program/kegiatan/subkegiatan BKPSDMD pada tahun 2021 mencapai 100%, artinya program/kegiatan/subkegiatan terlaksana dengan baik dan memenuhi target yang ditetapkan.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun program/kegiatan dengan tingkat realisasi yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Kepegawaian Daerah

- Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan,

informasi dan peningkatan kapastitas pegawai dengan target 96% dan realisasi 201,55%

- Persentase ASN yang prestasi dan perilaku kerja berkategori baik dengan target 99,79% dan realisasi 99,83%
- a.1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Jumlah CASN/IPDN yang lulus seleksi dengan target 146 orang, realisasi 593 orang
- a.2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi dengan target dengan target 200 orang, realisasi 1129 orang
- a.3. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani dengan target 8 kasus, realisasi 9 kasus
- a.4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - Jumlah ASN yang menerima beasiswa dengan target 11 orang, realisasi 11 orang
- B. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Persentase ASN yang meningkat kompetensinya dengan target 74%, realisasi 154,62%.
 - b.1. Kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
 - Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis dengan target 350 orang, realisasi 816 orang
 - b.2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Jumlah CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Prajabatan dengan target 1.278 Orang, realisasi 1.278 Orang

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program/kegiatan tahun anggaran 2021 secara umum disebabkan karena seluruh sektor terdampak pandemi COVID-19 yang mulai dirasakan oleh Indonesia pada Bulan Desember 2019 dan korban terus meningkat di secara merata di wilayah Indonesia pada Bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang. Sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah melakukan perubahan prioritas dengan *merefocussing* anggaran untuk penanganan COVID-19, dan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.

Bahkan sarana asrama yang diperuntukan bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang berada di lingkungan gedung kantor BKPSDMD ditetapkan sebagai Wisma Karantina bagi pasien COVID-19.

Adapun sistem kerja dan etika kerja pada Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami penyesuaian yaitu dengan diberlakukannya sistem kerja *Work From Home* sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Secara spesifik beberapa faktor penghambat dan pendorong yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

Realisasi kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 pada sasaran Meningkatnya Kompetensi Aparatur Terhadap Jabatan dengan indikator Persentase ASN Yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan dari target 80% terealisasi 88,10%. Capaian ini sudah melampaui target yang telah ditetapkan dan mengalami kemajuan 23,80% apabila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 71,16%. Walaupun mengalami peningkatan capaian namun kondisi tidak mandirinya lembaga kediklatan yang masih bergabung dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretariat KORPRI menyebabkan upaya peningkatan kompetensi ASN tidak

maksimal karena alokasi anggaran terbagi menjadi 3 urusan, yaitu kepegawaian, kediklatan, dan sekretariat KORPRI.

B. Faktor Pendorong

- Realisasi capaian sasaran Meningkatnya Kompetensi Aparatur Terhadap Jabatan dengan indikator Persentase ASN Yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan sudah terealisasi mencapai target dengan tingkat capaiannya 110,12% dapat dikategorikan sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dengan meningkatnya kesadaran pegawai akan hak mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi minimal 20 JP per tahun dan dapat dilaksanakan secara daring/webinar.
- Realisasi kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 pada sasaran Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN dengan indikator Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori minimal baik dari target 99,79% terealisasi 99,83%. Realisasi telah mencapai target yang ditetapkan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kemajuan sebesar 0,39%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bila dibandingkan dengan tahun lalu sedikit naik. Hal ini disebabkan karena meningkatnya disiplin PNS dengan diberlakukannya absensi pemindaian baik sidik jari maupun wajah serta penilaian kinerja berbasis aplikasi.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BKPSDMD.

Implikasi yang ditimbulkan dengan tidak tercapainya target pada beberapa program/kegiatan secara umum menyebabkan sisa anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BKPSDMD Tahun Anggaran 2021 namun tidak terlalu signifikan untuk seluruh program pada belanja langsung. Ini terbaca pada laporan realisasi keuangan triwulan IV Tahun Anggaran 2021 dimana realisasi keuangan BKPSDMD sebesar 97,94% dan SILPA sebesar 2,06%. Secara keseluruhan capaian

kinerja Renstra BKPSDMD sampai dengan Tahun Anggaran Tahun 2021 mencapai 143,86% (kategori "Sangat Tinggi").

Lebih khusus, implikasi terhadap capaian kinerja program/kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Implikasi tidak tercapainya target kinerja program.
 1. Perencanaan kurang optimal.
 2. Anggaran tidak digunakan dengan optimal.
- b. Implikasi tercapainya target kinerja program
 1. Perencanaan tepat sasaran.
 2. Anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
 3. Jabatan struktural dapat terisi sesuai SOTK/kebutuhan.
 4. Kinerja meningkat.
 5. Terselenggaranya peningkatan kompetensi teknis dan fungsional bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 6. Terselenggaranya pendidikan formal PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik penerima beasiswa APBD maupun beasiswa K/L/Sponsor.
 7. Terselenggaranya pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, promosi dan mutasi pegawai.
- c. Implikasi capaian kinerja program melebihi target.
 1. Terdapat PNS yang telah mengikuti Diklatpim namun belum menduduki jabatan.
 2. Lebih banyak jumlah PNS yang mendapatkan hak diklat 20 jpl/tahun.
 3. Kinerja meningkat.
 4. Pemenuhan sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.
 5. Terselenggaranya pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, promosi dan mutasi pegawai.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 kegiatan yang melebihi target justru lebih banyak daripada kegiatan yang tidak memenuhi target. Sebagaimana uraian diatas dapat diketahui bahwa penyebab tidak tercapainya target kegiatan di luar kendali organisasi BKPSDMD. Sehingga BKPSDMD akan semakin memperkuat koordinasi dan konsultasi terkait perkembangan kebijakan baik dari pusat maupun kepala daerah. Adapun kegiatan-kegiatan yang capaiannya melebihi target dipandang perlu mendapat perhatian sehingga dalam perencanaan di masa yang akan datang dapat ditetapkan target yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Penyesuaian perlu dilakukan untuk meminimalkan kesenjangan antara target kinerja dan realisasi capaian kinerja program/kegiatan.

Lebih jelas, kebijakan/tindakan yang akan diambil sebagai berikut:

- a. Kebijakan/tindakan yang akan diambil sebagai implikasi tidak tercapainya kinerja program RENSTRA BKPSDMD.
 1. Penguatan kewenangan lembaga diklat sehingga peningkatan kompetensi ASN lebih maksimal.
 2. Mendorong lahirnya inovasi dan kreatifitas dalam mengatasi minimnya anggaran
- b. Kebijakan/tindakan yang akan diambil sebagai implikasi tercapainya kinerja program RENSTRA BKPSDMD.
 1. Akan dilakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh.
- c. Kebijakan/tindakan yang akan diambil sebagai implikasi realisasi kinerja program RENSTRA BKPSDMD melebihi target.
 1. Melakukan evaluasi kinerja dan penyesuaian target capaian.
 2. Mengembangkan indikator kinerja agar cakupan layanan menjadi lebih luas.

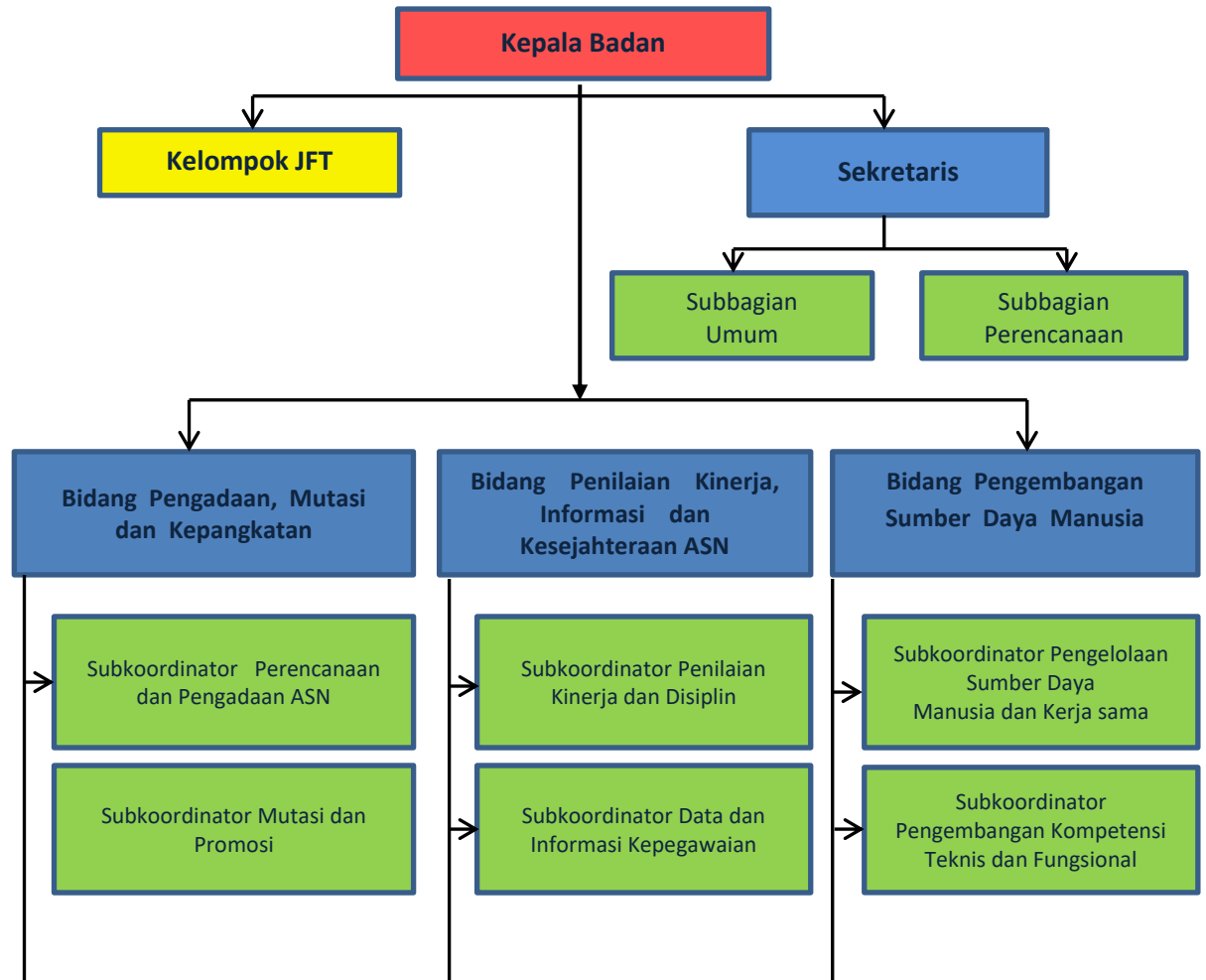
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Umum.

- c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan, membawahkan:
 - 1. Subkoordinator Perencanaan dan Pengadaan ASN;
 - 2. Subkoordinator Mutasi dan Promosi;
 - 3. Subkoordinator Kepangkatan dan Pensiun.
- d. Bidang Penilaian Kinerja, Informasi dan Kesejahteraan ASN, membawahkan:
 - 1. Subkoordinator Penilaian Kinerja dan Disiplin;
 - 2. Subkoordinator Data dan Informasi Kepegawaian;
 - 3. Subkoordinator Kesejahteraan ASN.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahkan:
 - 1. Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama;
 - 2. Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
 - 3. Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Guna mendukung kinerja dan berjalannya tugas serta fungsi dari organisasi di lingkungan BKPSDMD sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur yang dimiliki. Berdasarkan data pertanggal 31 Desember 2021, BKPSDMD didukung pegawai sebanyak 101 (seratus satu) orang. Dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.

Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin Pertanggal 31 Desember 2021

Sumber : Subbidang Data dan Informasi

Tabel 2.3.

Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Pertanggal 31 Desember 2021

Sumber : Subbidang Data dan Informasi

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja BKPSDMD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi digunakan alat ukur yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dan sasaran strategis BKPSDMD. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Indikator Kinerja Utama BKPSDMD

Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel di atas memiliki definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama BKPSDMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)
1	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan	Jumlah ASN yang berkompeten / Jumlah ASN Provinsi x 100
2	Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori baik	(Jumlah ASN yang memiliki nilai SKP minimal Baik - Jumlah ASN yang mendapatkan hukuman disiplin) / Jumlah ASN x 100

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan teknik penghitungan realisasi capaian IKU BKPSDMD yaitu :

1. Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan.
Capaian ini dapat dihitung melalui pengukuran indeks profesionalitas ASN. Hasil pengukuran tersebut dapat diinventarisir jumlah ASN yang memenuhi kompetensi yang akan dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori baik.
Capaian ini dapat dihitung melalui capaian kinerja individu Jumlah ASN yang capaian kinerja berkategori minimal baik dikurangi dengan jumlah ASN yang menerima hukuman disiplin kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh

pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dilakukan melalui pelaksanaan 3 (tiga) program yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Kepegawaian Daerah; dan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Capaian Indikator Program selama 5 (lima) tahun terkait urusan kepegawaian dan urusan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Capaian Indikator Program (outcome)

Adapun hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan BKPSDMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah perlu dilakukan identifikasi permasalahan sebagai strategi untuk mengetahui isu strategis dalam pelaksanaan tupoksi BKPSDMD, sekaligus meningkatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang dalam mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman.

Reformasi Birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan, tetapi merupakan kebutuhan dalam perbaikan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Reformasi Birokrasi dilaksanakan untuk **mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia pada Tahun 2025**. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, salah satunya dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di suatu instansi pemerintah ditentukan oleh ASN sebagai faktor kunci. Kualitas ASN yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kualitas ASN dapat dilihat melalui kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing ASN. Perlu dilakukan pengelolaan kompetensi pegawai melalui peningkatan kompetensi secara sistematis dan berkesinambungan agar kedepannya kualitas ASN dapat terus terjaga dan meningkat dari sebelumnya.

2.3.1. Sinergi Program Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 mengangkat tema **Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas**. Ada 5 (lima) prioritas nasional yang akan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1). Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- 2). Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah;
- 3). Menciptakan Nilai Tambah Baik Sektor Pertanian, Manufaktur dan Sektor Jasa;

- 4). Mengenai Ketahanan Pangan, Energi dan Air;
- 5). Stabilitas Keamanan nasional dan pengamanan Pemilu.

Prioritas pertama nasional yaitu pembangunan sumber daya manusia direncanakan akan berlangsung besar-besaran. Hal ini dilakukan dengan alasan karena negara tidak bisa terus menerus bergantung kepada kekayaan yang dihasilkan dari sumber daya alam, seperti batu bara, minyak dan gas. Kunci untuk pertumbuhan ekonomi ke depan adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan pada tahap ke-III (2017-2022) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 yaitu **Pembangunan Ekonomi dan Terpenuhi Kapasitas dan Kualitas SDM.**

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masih ditemukan beberapa permasalahan dan hambatan, sebagai berikut:

- 1) Penjaminan mutu kediklatan.

Penggabungan unit kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Sekretariat KORPRI mengakibatkan kewenangan pelaksanaan fungsi dan anggaran pengembangan kompetensi SDM menjadi terbatas.

- 2) Kedisiplinan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal

Banyak upaya untuk mendisiplinkan PNS tidak diakomodir dan program tunjangan kinerja (Tukin) belum optimal sehingga masih membutuhkan pengembangan.

- 3) Aplikasi kepegawaian belum optimal dan terintegrasi.

Beberapa aplikasi kepegawaian masih belum optimal sehingga administrasi masih banyak menggunakan kertas. Dengan aplikasi kepegawaian yang lebih optimal, diharapkan program *paperless* dapat mendorong pencapaian reformasi birokrasi dan penataan arsip. Saat ini juga aplikasi masih bersifat sektoral belum terintegrasi dengan baik. Banyaknya aplikasi yang harus

ditangani dan diremajakan berdampak pada besarnya sumber daya (manusia, waktu, anggaran) yang harus dikeluarkan setiap tahun.

4) Belum optimalnya perencanaan ASN.

Perencanaan ASN belum optimal karena rencana kebutuhan pegawai lima tahunan belum sesuai dengan rencana strategis organisasi; Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan belum berbasis TI; serta belum adanya metode yang jelas dan terstruktur dalam menentukan rencana distribusi pegawai.

5) Belum optimalnya pemberdayaan KORPRI dan pembekalan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun.

Sejak lembaga pelayanan KORPRI bergabung dengan lembaga pelayanan kediklatan dan kepegawaian dalam 1 (satu) unit kerja BKPSDMD, program/kegiatan pembinaan KORPRI hampir tidak mendapat peluang dari segi penganggaran. Padahal anggota KORPRI adalah seluruh ASN se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa program/kegiatan pembinaan seperti bakti sosial KORPRI, bimbingan teknis bagi anggota yang memasuki masa pensiun, dan lain-lain masih sangat dibutuhkan.

6) Belum optimalnya audit atau assesment, perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi ASN.

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah

Pencapaian visi misi kepala daerah tentunya akan berpengaruh jika permasalahan dan hambatan yang dihadapi BKPSDMD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sedikit banyak, khususnya keberhasilan Misi ke-5 yaitu **meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi**. Apabila permasalahan tidak diatasi dengan baik, capaian Misi ke-5 akan terhambat. Dengan pemanfaatan sistem informasi penghitungan indeks profesionalitas ASN dengan menggunakan aplikasi (bukan manual) mampu memberikan hasil yang lebih meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPSDMD

Beberapa hal yang teridentifikasi sebagai tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDMD yakni sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1). Tuntutan pelayanan yang lebih baik;
- 2). Keinginan Kepala Daerah untuk menjadi yang terdepan dan rujukan penyelenggaraan kediklatan di wilayah barat Indonesia.

b. Peluang

- 1). *Human Capital Management (HCM)* Aparatur Sipil Negara
- 2). SMART ASN (ASN yang memiliki karakteristik berwawasan global, menguasai teknologi dan informasi serta bahasa, memiliki kemampuan jejaring atau *networking* tinggi dengan kemampuan *skill multitasking* yang proporsional).
- 3). Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- 4). Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024.
- 5). Prioritas Pusat dalam pengembangan kompetensi ASN berupa kebijakan pengalokasian anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 0,34% dari total belanja daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BKPSDMD yang akan dituangkan ke dalam usulan program/kegiatan/subkegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan pada Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023. Program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Proses review ini dilakukan untuk memberi keyakinan

terbatas bahwa analisis kebutuhan BKPSDMD dalam Renja sesuai dengan dokumen Rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat umum. Sasaran program/kegiatan/subkegiatan BKPSDMD adalah Aparatur Sipil Negara. Khususnya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan umumnya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur. Namun pelayanan yang dimiliki BKPSDMD seperti fasilitas ruang pertemuan/aula, ruang belajar/kelas, penginapan/asrama/paviliun diperuntukkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan memiliki anggaran masing-masing. Pemanfaatan fasilitas inilah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui BKPSDMD.

BKPSDMD dalam proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 tidak dilakukan tahapan Forum Perangkat Daerah/rapat koordinasi teknis Perangkat Daerah dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan efektifitas hasil, selain itu juga pertimbangan tidak ada usulan dari masyarakat dan Kabupaten/Kota terkait urusan kepegawaian serta urusan pendidikan dan pelatihan baik dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2023, Forum Trilateral Meeting antara BKPSDMD dengan Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/kota maupun melalui penyampaian pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pokir DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan aspirasi dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDMD



3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. RKP sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan, terutama oleh Pemerintah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** menjadi tema yang diangkat pada Rancangan RKP 2023.

RKP 2022 memiliki tujuh arah kebijakan prioritas nasional, yaitu :

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan
3. penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
4. mendorong pemulihan dunia usaha
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. ekonomi hijau
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi

RKP menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP). Namun, dalam draft rancangan RKP 2023 yang telah dipublikasikan secara khusus masih akan melanjutkan prioritas tahun sebelumnya dan belum ada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDMD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari misi. Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 terkait dengan aparatur yaitu mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi adalah meningkatkan profesionalitas aparatur dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN).

Sasaran dalam RPD Provinsi tersebut sejalan dengan sasaran dalam Renstra BKPSDMD. Ada 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan profesionalitas aparatur yaitu :

1. Meningkatkan standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur;

Salah satu upaya dalam meningkatkan profesionalitas ASN yaitu dengan melihat kesesuaian kualifikasi pendidikan, tingkat kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kualifikasi pendidikan diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); Pendidikan S-2 (Strata-Dua); Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat); Pendidikan D-3 (Diploma-

Tiga); Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / D-1 (Diploma-Satu) / SLTA Sederajat; dan Pendidikan di bawah SLTA. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku kerja. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang telah dicapai, serta tingkat kinerja dan disiplin pegawai maka diharapkan akan meningkatkan profesionalitas aparatur.

2. Meningkatnya Kompetensi Aparatur;

Upaya lainnya dalam meningkatkan profesionalitas ASN yaitu meningkatkan kompetensi yang diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi Diklat Kepemimpinan; Diklat Fungsional; Diklat Teknis; dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara. Semakin tinggi tingkat kesesuaian pegawai dengan standar kompetensi yang dimilikinya maka diharapkan dapat meningkatkan indeks profesionalitas ASN dan pada akhirnya akan meningkatkan indeks reformasi birokrasi.

Hubungan antara tujuan sasaran RPD dan tujuan-sasaran BKPSDMD Tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.

Keterkaitan Tujuan Sasaran RPD dan Tujuan Sasaran BKPSDMD
beserta Target pada Renja Tahun 2023

RPD		RENSTRA		Indikator Sasaran	Target Sasaran
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Target 68,25	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Target 68,25	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Indikator Nilai Indeks Profesionalitas ASN Target 87	1. Meningkatnya standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur	Persentase ASN yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur	95,50%
			2. Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi Sesuai dengan Jabatan	80%

3.3. Program dan Kegiatan

Meningkatnya standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur serta Meningkatnya Kompetensi Aparatur adalah dua hal yang menjadi sasaran utama dalam meningkatkan profesionalitas aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mencapai kedua sasaran ini perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian diimplementasikan dalam kegiatan dan subkegiatan. Program yang ditetapkan merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk penjabaran dan turunan dari Rencana Strategis yang berisikan program dan kegiatan yang dilaksanakan tiap tahunnya untuk mencapai target dalam indikator kinerja yang dapat memberi kontribusi bagi tercapainya tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dapat diwujudkan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2023 terdiri dari 12 (duabelas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) subkegiatan yang tercakup dalam 3 (tiga) program, yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI;
2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH; dan
3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Lokasi penyelenggaraan seluruh program/kegiatan/subkegiatan difokuskan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk mengakomodir kebutuhan operasional pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan usulan pagu indikatif dari BKPSDMD.

Untuk lebih jelas rumusan rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	03				KEPEGAWAIAN						29,933,427,226			30,542,814,333			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						23,336,825,702			23,966,253,845			
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						130,000,000			144,000,000			
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	2 Dokumen	7 Dokumen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	66,000,000
5	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	1 Dokumen	7 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	33,000,000
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	4 Laporan	7 Dokumen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	45,000,000
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15,965,125,702			16,364,253,845			
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	101 Orang/ Bulan	70 Nilai	15,965,125,702	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	16,364,253,845
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100,000,000			105,000,000			
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	0 Orang 15 Orang	70 Nilai	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	105,000,000

5	03	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,564,000,000					1,755,000,000
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disediakan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	30 Paket	70 Nilai	64,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	75,000,000
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disediakan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	7 Paket	70 Nilai	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	250,000,000
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disediakan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	20 Paket	70 Nilai	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	110,000,000
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disediakan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	3 Dokumen	70 Nilai	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	110,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
5 03 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disediakan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	5 Paket	70 Nilai	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	550,000,000
5 03 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disediakan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	12 Laporan	70 Nilai	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	110,000,000
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Nilai 82 Nilai	12 Laporan	70 Nilai	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	550,000,000
5 03 01 1.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,951,700,000					4,001,500,000
5 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	12 Laporan	3 Jenis	98,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	110,000,000
5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	12 Laporan	3 Jenis	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	837,800,000
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	12 Laporan	3 Jenis	3,053,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	3,053,700,000
5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,626,000,000					1,596,500,000
5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	7 Unit	10 Jenis	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	220,000,000
5 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	3 Unit	10 Jenis	1,126,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	1,046,500,000
5 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sanana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Jumlah Sanana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 Nilai 82 Nilai	121 Unit	10 Jenis	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM) Nilai Sakip PD (BKPSDM)	70 Nilai 82 Nilai	330,000,000
5 03 01	KEPULAUAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG								6,406,400,000					6,406,400,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan									baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan			
5 03 02 1.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah CASN/IPDN yang lulus seleksi	Jumlah pegawai yang terpenuhi sesuai formasi melalui pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	100 Orang	85 Orang	250,302,087	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	312,877,000	
5 03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah PNS yang diberikan SK Pensiun/Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun	Jumlah pegawai yang terpenuhi sesuai formasi melalui pengadaan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	112 SK	85 Orang	56,684,338	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	70,855,422	
5 03 02 1.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah pegawai yang terpenuhi sesuai formasi melalui pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Lembaga	85 Orang	1,594,291,132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	900,000,000	
5 03 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah pegawai yang terpenuhi sesuai formasi melalui pengadaan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Dokumen	85 Orang	87,664,633	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	60,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
5 03 02 1.01 11	Pengelolaan Data Kependidikan	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kependidikan	Jumlah pegawai yang terpenuhi sesuai formasi melalui pengadaan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Dokumen	85 Orang	66,395,759	PENDAP/PTAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	37,856,816	
5 03 02 1.02	Mutasi dan Promosi ASN								800,000,000				900,000,000	
5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah ASN yang di mutasi dan promosi	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	330 Orang 0 Dokumen	330 Orang	250,000,000	PENDAP/PTAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	275,000,000	
5 03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah ASN yang diterbitkan sk kenaikan pangkat	Jumlah ASN yang di mutasi dan promosi	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1180 Orang	330 Orang	200,000,000	PENDAP/PTAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	250,000,000	
5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah ASN yang dptakan kompetensinya	Jumlah ASN yang di mutasi dan promosi	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	330 Orang	330 Orang	350,000,000	PENDAP/PTAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	375,000,000	
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN								3,221,250,000				3,705,156,250	
5 03 02 1.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	600 Orang	1310 Orang	500,000,000	PENDAP/PTAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	562,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
		Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan										Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	
5 03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Dokumen	1310 Orang	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %
5 03 02 1.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Dokumen	1310 Orang	465,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Dokumen	1310 Orang	440,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %
5 03 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Dokumen	1310 Orang	116,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %
5 03 02 1.03 06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya		Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan,	24,42 % 99,85 %	10 Orang	1310 Orang	100,000,000			Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	24,42 % 99,85 %

Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN		Air Itam	94 % 85 %				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	94 % 85 %	
5 03 02 1.03 07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Laporan	1310 Orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	112,500,000
5 03 02 1.03 08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	100 Orang	1310 Orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	56,250,000
5 03 02 1.03 09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Dokumen	1310 Orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	50,000,000
5 03 02 1.03 10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	100 Orang	1310 Orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	56,250,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 02 1.03 11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Laporan	1310 Orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	50,000,000
5 03 02 1.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Laporan	1310 Orang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	225,000,000
5 03 02 1.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	500 Orang	1310 Orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	168,750,000
5 03 02 1.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Dokumen	1310 Orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	112,500,000
5 03 02 1.03 15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Laporan	1310 Orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan										Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan		
5 03 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								460,000,000					515,000,000
5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang terbina	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	1 Dokumen	5360 Orang	50,034,605	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	60,034,605
5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang terbina	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	0 Orang 3 Orang	5360 Orang	274,848,183	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	289,848,183
5 03 02 1.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Jumlah ASN yang terbina	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	600 Orang	5360 Orang	35,063,210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	45,063,210
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang terbina	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	0 Orang 2200 Orang	5360 Orang	49,983,762	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	59,983,762

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5 03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengedean	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang terbiasa	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	7 Laporan	5360 Orang	50,070,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengedean	24,42 % 99,85 % 94 % 85 %	60,070,240
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								20,700,000,000				21,275,200,000
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								20,700,000,000				21,275,200,000
5 04 02 1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis								4,600,000,000				4,675,200,000
5 04 02 1.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi teknis	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 %	10 Dokumen	3152 Orang	51,388,429	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	70 %	51,388,429
5 04 02 1.01 02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi teknis	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 %	10 Dokumen	3152 Orang	51,788,741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	70 %	51,788,741
5 04 02 1.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi teknis	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 %	3152 Orang	3152 Orang	4,449,904,089	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	70 %	4,525,104,089
5 04 02 1.01 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi teknis	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 %	10 Dokumen	3152 Orang	46,918,741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	70 %	46,918,741

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Penegkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum												
5 04 02 1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								16,100,000,000				16,600,000,000
5 04 02 1.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pendidik, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Pejabat, serta Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikat pelatihan manajerial, dan fungsional	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 %	1 Dokumen	600 Orang	8,994,953	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	70 %	8,994,953
5 04 02 1.02 02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikat pelatihan manajerial, dan fungsional	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 %	1 Dokumen	600 Orang	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	70 %	30,000,000
5 04 02 1.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tersertifikasi	Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikat pelatihan manajerial, dan fungsional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	120 Orang	600 Orang	197,968,129	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	70 %	197,968,129
5 04 02 1.02 04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pendidik, dan Sumber Belajar	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pendidik, dan Sumber Belajar	Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikat pelatihan manajerial, dan fungsional	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 %	3 Laporan	600 Orang	324,159,918	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	70 %	324,159,918
5 04 02 1.02 05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikat pelatihan manajerial, dan fungsional	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 %	1 Dokumen	600 Orang	93,317,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	70 %	93,317,000
5 04 02 1.02 06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang disusun	Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikat pelatihan manajerial, dan fungsional	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	70 %	1 Dokumen	600 Orang	61,415,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	70 %	61,415,200
5 04 02 1.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikat pelatihan manajerial, dan fungsional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	600 Orang	600 Orang	15,038,584,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	70 %	15,512,264,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kepemimpinan, dan Prajabatan		Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Kelurahan									
5 04 02 1.02 08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	Hasil Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikat pelatihan manajerial, dan fungsional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	5 dokumen 0 Dokumen	600 Orang	345,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	70 %	345,560,000
TOTAL									50,633,427,226					51,818,014,333

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN



4.1. Rencana Kerja

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) yaitu meningkatkan profesionalitas ASN melalui peningkatan standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur serta kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Indikator program/kegiatan/subkegiatan (*outcome/output/suboutput*) yang direncanakan merupakan kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing bidang dan subbidang di lingkungan BKPSDMD yang disusun ke dalam rencana kerja tahun 2023 dan diuraikan menjadi 3 (tiga) program yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai, terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 2 (dua) program teknis dengan 12 (dua belas) kegiatan serta 59 (lima puluh sembilan) subkegiatan dalam Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi; Urusan Kepegawaian Daerah; serta Urusan Pendidikan dan Pelatihan dengan total anggaran sebesar Rp50,633,427,226 (Lima Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih jelas diuraikan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - f. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

I. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - a. Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - c. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - d. Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - e. Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - f. Subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - a. Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - b. Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c. Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - a. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - b. Subkegiatan Pengelolaan Assesment Center
 - c. Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 - d. Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - e. Subkegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
 - f. Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
 - g. Subkegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
 - h. Subkegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
 - i. Subkegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
 - j. Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
 - k. Subkegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional
 - l. Subkegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
 - m. Subkegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
 - n. Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

- o. Subkegiatan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
- 4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - a. Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b. Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - c. Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
 - d. Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN
 - e. Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- II. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - 1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - a. Subkegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - b. Subkegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - c. Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - d. Subkegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - 2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a. Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- b. Subkegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
- c. Subkegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga
- d. Subkegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
- e. Subkegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- f. Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
- g. Subkegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- h. Subkegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional

4.2. Pendanaan

Penyelenggaraan program/kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan dukungan pendanaan dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

BAB V

PENUTUP



A. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan tujuan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah secara efektif dan efisien, disamping itu Renja ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2023.

Sebagai upaya penanganan isu strategis pembangunan tahun 2023 maka BKPSDMD memiliki program prioritas sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah; dan
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Kedua program prioritas tersebut memiliki beberapa indikator dan target yang telah disepakati dan ditetapkan harus dilaksanakan sehingga dibutuhkan dukungan dari sisi penganggaran agar prioritas pembangunan daerah dapat tercapai.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 dan 2021;
2. Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 dan 2021;
3. Memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
4. Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan harus dicapai;

5. Memperhatikan keberlanjutan program yang terdapat pada Renstra BKPSDMD selama lima tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengantisipasi target yang tidak tercapai atau bahkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi tersebut terdiri dari pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana kerja. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja dilaksanakan secara periodik setiap triwulanan terkait program/kegiatan, kinerja dan anggaran, permasalahan dan faktor pendorong dan penghambat serta rencana tindak lanjut yang diperlukan.

Pangkalpinang, Juni 2022

KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dra. SUSANTI, M.AP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650713 199203 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka-Kelurahan Air Itam kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418

Telp. (0717)439314, 439315, 439500 Fax : (0717) 439316,

Email : bkd@babelprov.go.id Website : bkd.babelprov.go.id